

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
94 TAHUN 2021 TENTANG SANKSI HUKUMAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
DPRD KOTA BEKASI**

TESIS



Oleh:

SETIADI

202120251025

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER
ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 94 TAHUN 2021 SANKSI HUKUMAN
DISIPLIN NEGERI SIPIL, DI PEMERINTAH
DAERAH PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA
BEKASI

Nama Mahasiswa : SETIADI

Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251025

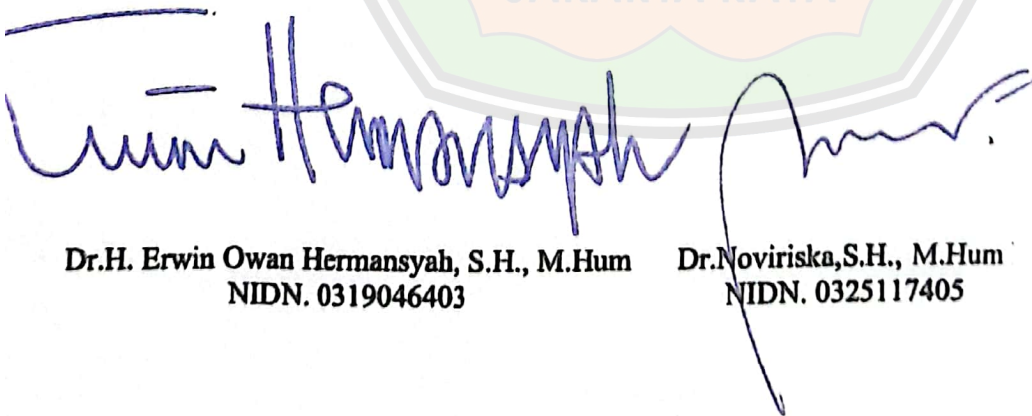
Program Studi/ Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Bekasi, 10 Juli 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr.H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.Hum
NIDN. 0319046403

Dr.Noviriska,S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Tesis : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR. 94 TAHUN 2021 TENTANG
SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT
DPRD KOTA BEKASI

Nama Mahasiswa : SETIADI
Nomor Pokok Mahasiswa : 202120251025
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu
Hukum/Fakultas : Hukum
Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 22 Juli 2023

Bekasi, 22 Juli 2023
MENYETUJUI,

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. M. S. Tumanggor, S.H.M. Si. M.M
NIDN.0304065402

Penguji I : Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 0379046403

Penguji II : Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H.
NIDK.8909760023

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dr. Sugeng, S.H., M.H.
NIDN. 0304027301

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. R.R. Dijan Widijowati, S.H., M. H
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: Tesis yang berjudul PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO.94 TAHUN 2021 TENTANG SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, sayabersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjam dan digadakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 22 Juli 2023

Yang membuat
pernyataan,



Setiadi

NPM.202120251025

ABSTRAK

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 94 TAHUN 2021 TENTANG SANKSI HUKUMAN DISIPLIN PEKAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT DPRD KOTA BEKASI.

Penelitian mengenai penerapan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bekasi Jawa Barat dilatar belakangi bahwa di lingkungan Pemerintah kota Bekasi Jawa Barat, didapati jenis pelanggaran disiplin ASN tertinggi adalah tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Permasalahan penelitian adalah bagaimana penerapan serta kendala-kendala dalam hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Bekasi Jawa Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini adalah, penerapan hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja melalui BKPSDM Kota Bekasi Jawa Barat telah optimal menurunkan tingkat pelanggaran disiplin, dan dilaksanakan melalui peraturan-peraturan pelaksana PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Kendala pemberian hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yaitu : dari faktor penegak hukum/aparatur, yaitu Pejabat atasan langsung yang ditunjuk memiliki wewenang dan tupoksi tugas serta bertanggungjawab dalam menangani masalah kepegawaian yang ada dalam SKPD, permasalahan hukum yang terjadi yaitu: kurangnya tanggung jawab atasan langsung dalam menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran disiplin ke BKPSDM sebagai SKPD yang sepenuhnya menangani Kasus ini.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara (ASN), Sanksi Hukuman Disiplin, Tidak Masuk Kerja & Tidak Menaati Ketentuan Jam Kerja

ABSTRACT

INVESTIGATION OF GOVERNMENT REGULATION NO.94 OF 2021 REGARDING DISCIPLINARY SANCTIONS OF STATE CIVIL OFFICERS SECRETARIAT OF BEKASI CITY DPRD.

Research on the application of disciplinary punishment for State Civil Apparatuses (ASN) who do not come to work and comply with the provisions of working hours through the Civil Service and Human Resources Development Agency (BKPSDM) Bekasi City, West Java has the background that in the Bekasi City Government environment, West Java, types of violations were found. The highest ASN discipline is not coming to work and complying with the provisions of working hours. The research problem is how to apply and the constraints in disciplinary punishment for ASN who do not come to work and comply with the provisions of working hours through the BKPSDM Bekasi City, West Java. This type of research is empirical legal research, with the types and sources of research materials obtained from primary data and secondary data through library research and field studies. The data were analyzed qualitatively, with a deductive conclusion drawing technique. The results of this study are that the application of disciplinary punishment for ASN who does not show up for work and obeys the provisions of working hours through the BKPSDM of Bekasi City, West Java has optimally reduced the level of disciplinary violations, and is carried out through implementing regulations PP Number 94 of 2021 concerning Disciplinary Punishments for Civil Servants in Local Government At the Secretariat of DPRD Kota Bekasi. Obstacles in giving disciplinary punishment to ASN who do not show up for work and comply with the provisions of working hours, namely: from law enforcement/apparatus factors, namely the official directly superior who is appointed to have the authority and duties and is responsible for handling staffing problems in the SKPD, legal problems that occur namely: the lack of responsibility of the direct supervisor in resolving cases of alleged disciplinary violations to the BKPSDM as the SKPD that fully handles this case.

Keywords: State Civil Apparatus (ASN), Disciplinary Penalties, Absence of Work & Failure to Comply with Working Hours

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, serta shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini sebagaisalah satu syarat dalam meraih gelar Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Walaupun hasil penelitian tesis ini bukan karya yang sempurna, tetapi peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat. Untuk itu peneliti ingin memberikan rasa penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dalam proses penyelesaian tesis ini. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penelitian tesis ini tidak luput dari bantuan dandukungan berbagai pihak. Karena itu peneliti turut mengucapkan terimakasih kepada :

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Prof.Dr.M.S.Tumanggor,S.H.M.Si.M.M, selaku ketua penguji Tesis, yang sudah banyak memberikan masukan serta memberikan pemikiran agar saya dapat berkembang dalam berpikir.
3. Prof.Dr.Juanda,S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi Tesis yang telah memberikan waktu dan motivasi untuk peneliti sehingga pikiran dan wawasanpeneliti menjadi lebih terbuka.
4. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan motifikasi bagi peneliti dalam penelitian Tesis ini.
5. Dr. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing materi dan penguji Tesis yang telah memberikan cukup banyak waktu dan tenaga serta motivasi untuk peneliti dan pikiran yang lebih terbuka.
6. Dr. Dwi Andayani Budisetyowati,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing materi dan pengguji Tesis yang telah memberikan cukup banyak waktu dan tenaga serta motivasi untuk peneliti dan pikiran yang lebih terbuka.
7. Dr. Noviriska, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing materi Tesis yang telah memberikan cukup banyak waktu serta motivasi yang untuk peneliti sehingga pikiran dan wawasan peneliti menjadi lebih baik.
8. Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan nasehat dan motifikasi baik berupa saran maupun kritikan bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian Tesis ini.

9. Dr.Eka Hidayat Taufik.S.Ip.M.T Terimakasih atas dukungan dan bimbingannya serta nasehatnya terhadap Tesis yang peneliti buat.
10. Ayah Handa H.Carpan Effendi (ALM), Ibunda Hj,Suadah, terimakasih atas doa, dukungan dan berbagai pengorbanan yang tanpa pamrih mengasuh, mendidik serta mencurahkan seluruh kasih sayangnya.
11. Pahria.SE. Istri tercinta terimakasih atas dukungannya baik moral dan material yang diberikan untuk menyelesaikan studi Magister Hukum ini.
12. Putra Putri saya Hani Meliana dan Akbar Biazi, terimakasih atas segala dukungannya.
13. Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara, terimakasih atas segala kerjasama dan bantuannya serta terimakasih telah mengingatkan dan memberi saran-saran bermutu.
14. Teman-teman di Sekretariat DPRD Kota Bekasi, terimakasih atas segala dukungannya.

Sebagai manusia biasa, peneliti sangat menyadari dalam penelitian Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, peneliti selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan Tesis ini.

Bekasi, 10 Juli 2023
Peneliti

Setiadi

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....	9
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2. Rumusan Masalah.....	10
1.2.3. Studi Kasus	10
1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	11
1.3.1. Tujuan Penelitian	11
1.3.2. Kegunaan Penelitian	11
1.3.3. Manfaat Penelitian	12
1.4. Kerangka, Teoritis dan Konseptual.....	12
1.4.1. Kerangka Teoritis	18
1.4.2. Kerangka Konseptual.....	40
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	43
1.5. Metode Penelitian	51
1.5.1. Lokasi Penelitian.....	52
1.5.2. Penelitian hukum.....	52
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	56

1.5.3. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	59
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	64
2.1 Teori Negara Kesatuan.....	64
2.2 Asas Desentralisasi	72
2.3 Asas Otonomi Daerah	75
BAB III EFEKTIFITAS MEKANISME PEMBERHENTIAN ASN... 78	
3.1 Mekanisme Pemberhentian ASN.....	78
3.2. Manfaat dan Dampak dari Mekanisme Pemberhentian ASN... 86	
BAB IV ANALISIS PP NO.94 TAHUN 2021 TENTANG SANKSI HUKUMAN DISIPLIN ASN, DI PEMERINTAH DAERAH DI KOTA BEKASI .. 90	
4.1. Pelaksanaan Mekanisme Pemberhentian ASN di Pemerintah Daerah. 90	
4.2. Contoh Kasus	111
4.3. Undang-Undang terkait PP. No. 94 Tahun 2021 Tentang disiplin pegawai.....	114
BAB V PENUTUP	134
5.1 Kesimpulan	134
5.2 Saran.....	134
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	140